

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
(STUDI KASUS PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)**

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF  
THE REGIONAL GOVERNMENT OF TALAUD ISLANDS  
(CASE STUDY ON THE LOCAL GOVERNMENT WORK UNIT  
OF THE TALAUD ISLANDS REGENCY)*

Oleh:

**Stasya Meily Tingginehe<sup>1</sup>**

**Hans Hananto Andreas<sup>2</sup>**

**Marwata<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail:

<sup>1</sup> [232014277@student.uksw.edu](mailto:232014277@student.uksw.edu)

<sup>2</sup> [hans.andreas@uksw.edu](mailto:hans.andreas@uksw.edu)

<sup>3</sup> [marwata.marwata@uksw.edu](mailto:marwata.marwata@uksw.edu)

**Abstrak:** Kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya komitmen organisasi, penggunaan teknologi, pemahaman kebijakan, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner. Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan jumlah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah sampel sebanyak 199 orang. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen organisasi, penggunaan teknologi, penerapan SAP dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan variabel penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

**Kata kunci:** Komitmen Organisasi, Penggunaan Teknologi, Penerapan SAP, Penerapan SPIP, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan

**Absrtak:** *The quality of regional financial reports is influenced by several factors including organizational commitment, use of technology, understanding of policies, implementation of the Government Internal Control System, and supervision of regional finances. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the quality of the financial statements of the Talaud Islands Regency government This type of research is classified as quantitative research. Data in this study were obtained through questionnaires. The population in this study was conducted on the Talaud Islands Regency SKPD with 28 regional work units (SKPD). The number of samples was 199 people. Data analysis techniques using quantitative descriptive statistics using multiple regression tools. The results showed that organizational commitment, use of technology, application of SAP and regional supervision affect the quality of regional financial reports in the Regional Government Work Unit (SKPD) of Talaud Islands Regency. While the SPIP implementation variable does not affect the quality of the regional financial statements in the Regional Government Work Unit (SKPD) of the Talaud Islands Regency government.*

**Keywords:** *Organizational Commitment, Use of Technology, Application of SAP, Application of SPIP, Supervision of regional finances, Quality of Financial Statements*

## LATAR BELAKANG

Tuntutan akuntabilitas yang berlaku pada organisasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi fenomena yang berkembang di Indonesia sampai saat ini. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertugas untuk mengatur salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan.

Kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor komitmen organisasi, faktor Penggunaan Teknologi Informasi, faktor Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, faktor pemahaman kebijakan, dan faktor pengawasan keuangan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan literatur terdahulu Modo dkk (2016) yang digunakan sebagai acuan adalah terdapat penambahan variabel pengawasan keuangan daerah sebagai faktor yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Mengacu pada kasus tertangkapnya mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sri Manalip yang terlibat dalam kasus suap proyek atau *fee proyek* Pasar Lirung dan Pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 10% oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 April 2019. Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 27 Mei 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penerimaan predikat opini WTP tersebut diperoleh untuk ketiga kalinya, sejak tahun 2018. Ini menunjukkan belum tercapainya prinsip-prinsip yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum berkualitas. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah komitmen organisasi, penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, pemahaman kebijakan, dan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris serta menganalisis pengaruh komitmen organisasi, penggunaan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pemahaman kebijakan, serta pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenaan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenaan adalah perjanjian yang dilakukan oleh seorang individu atau lebih dimana salah satu pihak berperan sebagai prinsipal yang bertugas untuk memerintah, sedangkan pihak yang lain berperan sebagai agen yang bertugas menjalankan wewenang yang diberikan oleh prinsipal dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, agen sebagai pihak yang diberikan amanah harus mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan semua informasi yang menjadi kebutuhan para pemangku kepentingan (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik.

### Komitmen Organisasi

Menurut Vandenberg (1992) menjelaskan bahwa komitmen menunjukkan loyalitas seorang karyawan dan adanya keinginan untuk ikut terlibat dalam organisasi, serta berusaha meningkatkan organisasi, sehingga informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan bisa dioptimalkan.

### Penggunaan Teknologi Informasi

Menurut Efendi (2017) penggunaan teknologi informasi yang mencakup komputer, database, jaringan, dan sebagainya adalah suatu tingkatan pembauran teknologi informasi terhadap tugas-tugas akuntansi yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

### **Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP)**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah suatu proses dalam tindakan pimpinan dan pegawai dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang terjamin dengan cara melakukan pelaporan keuangan yang andal, kegiatan yang efektif dan efisien, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

### **Pemahaman Kebijakan**

Dalam hal ini, kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis Akrua. Dalam SAP (2005:56) menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi posisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang memiliki manfaat terhadap setiap pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan.

### **Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Pasal 1 ayat 6 dalam Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan adalah proses aktivitas yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa laporan keuangan dalam pemerintah daerah telah mengikuti perencanaan dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bermutu.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, suatu laporan keuangan harus andal, relevan, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan, agar laporan keuangan tersebut bisa dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Semakin berkualitasnya suatu laporan keuangan mencerminkan tanggungjawab kepala daerah telah sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya dalam mengolah suatu organisasi.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Komitmen organisasi sangat diperlukan demi mempertahankan kepatuhan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan secara *reliable* berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Vandenberg, 1992). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Modo (2016) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

*H1: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan*

### **Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang mengatur tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan hal yang wajib dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya teknologi informasi maka penyajian laporan keuangan akan semakin berkualitas. Penelitian terkait dilakukan oleh Agung dan Gayatri (2018) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi.

*H2: Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan*

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ketika Badan Pengawas Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sehingga dapat memperoleh laporan keuangan yang andal, efisiensi serta efektifitas, serta untuk mengatasi terjadinya kerugian pada keuangan negara. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Maksyur dkk (2015) yang hasilnya memperlihatkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah.

*H3: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan*

### **Pengaruh Pemahaman Kebijakan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Syarat tentang laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diantaranya bersifat andal, relevan, bisa

dibandingkan, serta dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Untuk itu, SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan juga harus mendapat perhatian, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian Sari (2014) mendukung bahwa pemahaman kebijakan membawa pengaruh positif bagi kualitas laporan keuangan.

*H4: Pemahaman Kebijakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan*

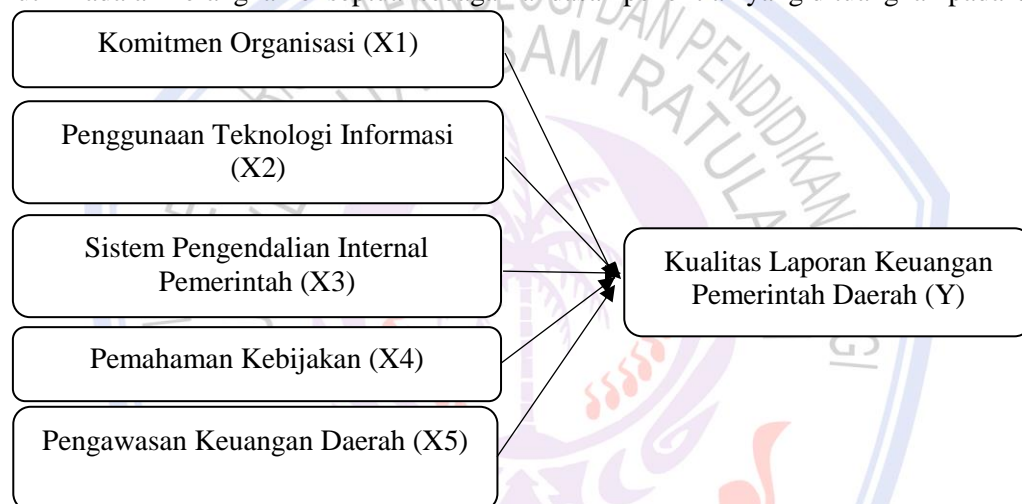
### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah (DPRD) memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, dan menindaklanjuti pengawasan terhadap hasil laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah, dan pengawasan berupa tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan dilakukan DPRD agar tidak terjadi penyimpangan atas penyalahgunaan wewenang, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi salah satu syaratnya yaitu relevan. Hasil penelitian Haza (2015) menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan keuangan daerah dapat membawa pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

*H5: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan*

### **Model Penelitian**

Berikut ini adalah kerangka konseptual sebagai landasan penelitian yang dituangkan pada Gambar 1.



**Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian**

*Sumber: Data Olahan, 2019*

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Data, Metode, dan Teknik Pengambilan Data**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan lima kategori derajat persetujuan yaitu "sangat tidak setuju" sampai dengan "sangat setuju".

### **Sampel Penelitian dan Teknik Pengumpulan Sampel**

Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 199 orang diantaranya merupakan staf bagian keuangan dan kepala bagian keuangan atau pejabat bagian tata usaha keuangan yang bekerja Dinas, Badan, dan kantor yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini hasil Uji Reliabilitas berdasarkan pada nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ), memenuhi unsur reliabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,60. Nilai *Item-Total Correlation* tiap indikator lebih besar dari 0,3 dengan alpha 5%, artinya data valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Pengujian asumsi klasik

yang dilakukan adalah Uji Normalitas guna mengetahui variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi secara normal atau tidak normal. Hasil Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, dimana nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar  $0,385 > 0,05$ . Selanjutnya, Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas yaitu nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi untuk variabel komitmen organisasi sebesar 0,837, pemanfaatan teknologi sebesar 0,362, penerapan SPIP 0,436, penerapan SAP sebesar 0,475, dan pengawasan keuangan daerah 0,535. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas
	Sig	Tolerance	VIF	Sig
Komitmen Organisasi	0.385	0.660	1.516	0.837
Pemanfaatan Teknologi		0.803	1.245	0.362
Penerapan SPIP		0.573	1.762	0.436
Penerapan SAP		0.668	1.733	0.475
Pengawasan keuangan daerah		0.637	1.656	0.535

Sumber: SPSS (data diolah), 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel berikut merupakan penyajian statistik deskriptif dari variabel komitmen organisasi, penggunaan teknologi informasi, penerapan SPIP, penerapan SAP, pengawasan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan dengan total nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil pertanyaan kuesioner kepada responden yang diolah menggunakan SPSS.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif	Total Nilai Rata-rata
Komitmen Organisasi	4.522
Pemanfaatan Teknologi	3,880
Penerapan SPIP	4.530
Penerapan SAP	4.139
Pengawasan Keuangan Daerah	4.520
Kualitas Laporan Keuangan	4.567

Sumber: SPSS (data diolah), 2019

### Pengujian Hipotesis

Berikut adalah hasil uji regresi berganda pengaruh komitmen organisasi, penggunaan teknologi informasi, penerapan SPIP, penerapan SAP, pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

**Tabel 3. Uji Regresi Berganda**

Variabel	T		F
	Koef. Regresi	Sig.	Sig.
Komitmen Organisasi	0.527	0.000	0.000
Pemanfaatan teknologi	0.187	0.002	
Penerapan SPIP	0.055	0.319	
Penerapan SAP	0.082	0.041	
Pengawasan Keuangan Daerah	0.215	0.005	

*Adjusted R Square* = 0.597

Sumber: SPSS (data diolah), Tahun 2019

Nilai Adjusted R square 0,597 yang berarti 59,70 % dari model penelitian ini dijelaskan oleh variabel yang diteliti dan sisanya oleh variabel lain diluar model penelitian.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan nilai signifikansi komitmen organisasi  $0,00 < 0,05$ , maka **H<sub>1</sub> diterima** yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi sebesar  $0,02 < 0,05$ , maka **H<sub>2</sub> diterima** yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi sebesar  $0,319 < 0,05$ , maka **H<sub>3</sub> ditolak**, yang artinya bahwa penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi penerapan SAP sebesar  $0,041 < 0,05$ , maka **H<sub>4</sub> diterima** yang artinya bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi pengawasan keuangan daerah sebesar  $0,005 < 0,05$ , maka **H<sub>5</sub> diterima**, yang artinya bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya bahwa variabel komitmen organisasi, penggunaan teknologi informasi, penerapan SPIP, penerapan SAP dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## **Pembahasan**

### ***Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan***

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini sejalan dengan Modo (2016) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Komitmen organisasi sangat diperlukan demi mempertahankan kepatuhan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan secara *reliable* berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### ***Pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan***

Penggunaan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini sejalan dengan Agung dan Gayatri (2018) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi. Semakin baik SKPD menggunakan teknologi informasi, maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan daerah.

### ***Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan***

Penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Maksyur dkk (2015) yang hasilnya memperlihatkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Kebijakan SPIP memberikan pengamanan aset – aset yang memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan memungkinkan tingkat kesalahan maupun kekeliruan dalam menyusun laporan keuangan berkurang.

### ***Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan***

Penerapan SAP berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari (2014) yang menemukan bahwa pemahaman kebijakan membawa pengaruh positif bagi kualitas laporan keuangan. Semakin pemerintah daerah memperhatikan penyajian terkait fungsi laporan keuangan, maka semakin baik SKPD melakukan penerapan SAP, sehingga laporan keuangan daerah berkualitas baik.

### ***Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan***

Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini sejalan dengan Haza (2015) menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan keuangan daerah dapat membawa pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa, semakin baik SKPD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

## PENUTUP

**Kesimpulan**

Komitmen organisasi, penggunaan teknologi, penerapan SAP dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan variable penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

**Keterbatasan dan Saran Penelitian Lebih Lanjut**

Penelitian ini hanya meneliti variabel komitmen organisasi, penggunaan teknologi, penerapan SAP, dan SPIP, serta pengawasan keuangan daerah, yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Saran bagi penelitian lebih lanjut, diharapkan mempertimbangkan atau menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, T. M. & Gayatri. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol 32, No.2, Hal: 1253-1276. ISSN: 2302-8556. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i02.p17> Diakses pada 10 Juni 2019
- Efendi, L. & Abdullah, S. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3, No.2, Hal: 182-195. ISSN:2502-6976. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/8230/6684> Diakses pada 10 Juni 2019
- Haza, Irfan Ikhwanul. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota Padang). *E-Jurnal Akuntansi*. Vol 3, No.1. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1604> Diakses pada 10 Juni 2019
- Jensen, M. & Meckling, W. H. (1976). The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 3, Hal:305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X) Diakses pada 10 Juni 2019
- Maksyur, V. & Valenra. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Data Manusia, Komitmen Manajemen, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indagiri Hulu). *Jurnal Manajemen FEKON*. Vol 2, No.2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9422> Diakses pada 10 Juni 2019
- Modo, S. M. & Saerang, D. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 7, No.2, Hal:14-30. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/13550> Diakses pada 10 Juni 2019
- Sari., N. P., Y.M.A. & Sujana. E. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuanga Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas-dinas Pemerintah di Kabupaten Jemberana). *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 2, No.1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2881> Diakses pada 9 Juli 2019

Vandenberg, Robert, J., & Charles, E. (1992). Examining The Causal Order of Job Satisfaction and Organizational Commitment. *Jurnal Manajemen*. <https://doi.org/10.1177/014920639201800110> Diakses pada 10 Juni 2019

